

Judul : Agar Petani Tetap Berproduksi - DPR: Naikkan Harga Gabah
Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Agar Petani Tetap Berproduksi

DPR: Naikkan Harga Gabah

Senayan mengingatkan pentingnya menjaga harga gabah di tingkat petani melalui kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah ini untuk menjaga petani terus semangat dalam meningkatkan produksi pertaniannya.

ANGGOTA Komisi IV DPR Andi Akmal Pasiuddin mengatakan, petani saat ini serius memproduksi pangan kebutuhan masyarakat. Namun, problem besar yang dihadapi petani saat ini yakni persoalan harga. Petani masih menghadapi serba ketidakpastian terutama saat terjadi panen raya.

Untuk atasi hal itu, menaikkan HPP gabah merupakan solusi terbaik saat ini.

"Seperti jagung, karena HPP-nya masih bagus, petani di Sulawesi Selatan masih gemar menanam jagung," tambah dia.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menuturkan, harga pangan saat ini masih terkendali. Selain di pasar, pengendalian harga di tingkat petani pun harus terjamin sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani.

Syahrul menuturkan, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Bank Indonesia (BI) dan Pangdam TNI serta jajaran Pemerintah Daerah untuk menyikapi inflasi dari kondisi global.

"Ingat, inflasi dunia itu lagi bergerak sangat signifikan Indonesia, semua data termasuk dalam jajaran negara yang inflasinya sekitar 4 persen lebih, cukup rendah dibanding negara lain," jelas Syahrul di sela-sela acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, kemarin.

Mantan Gubernur Sulsel ini menjelaskan, rantai distribusi pangan yang panjang mengakibatkan harga ke konsumen tinggi. Karena itu, rantai distribusi pangan harus disederhanakan sehingga mengurangi pihak yang mempengaruhi harga pangan.



Andi Akmal Pasiuddin

"Kita sudah diberikan alam yang luar biasa. Nah, ini tergantung kita. Bagaimana para bupati, gubernur bersinergi dengan semua pihak termasuk TNI, Polri dan ada Bank Indonesia yang terus memantau inflasi kita," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul memaparkan strategi Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi krisis

pangan dunia.

Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk kendali pengendalian inflasi. Seperti menggenjot produksi cabe dan bawang merah, serta mengurangi impor kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.

Kedua, pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum dan pengembangan ternak domba/kambing dan irik untuk substitusi daging sapi.

Ketiga, peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.

"Semua negara prihatin dengan kondisi yang ada, dan kita harus memberikan prioritas utama. Pertanian itu untuk makan dan tidak bisa diundut-undut, karena ini urusan makan rakyat," ujarnya.

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, acara kick off GNPIP merupakan salah satu upaya BI dalam pengendalian inflasi pangan di daerah.

Kegiatan ini juga merupakan aksi nyata mendukung pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu.

Ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

"Proyeksi inflasi kita 6 hingga 7 persen sampai akhir tahun. Kita harus sama-sama menurunkan daya beli masyarakat dan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita," jelasnya.

Doni menyebutkan upaya BI mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang dan penguatan ketahanan pangan. Dalam upaya tersebut, BI berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah.

Untuk menahan tingkat inflasi, BI melakukan beberapa upaya. Di antaranya menaikkan suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah serta membantu menjaga pasokan pangan.

"Semoga ke depan upaya kita mampu mengendalikan inflasi dengan baik," tutup Doni. ■ KAL